



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PANJATAN TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Panjatan Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panjatan Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Panjatan Tahun 2019 dengan segenap tenaga dan pikiran. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Panjatan, 23 Januari 2020

PANEWU PANJATAN

SETIAWAN TRI WIDADA, S.Sos  
Pembina Tk. I, IV.b  
NIP. 19710603 199101 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Panjatan yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022 adalah mengacu pada Visi Kabupaten Kulon Progo yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Panjatan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Panjatan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Panjatan Tahun 2017 - 2022.

Dari analisis terhadap dua (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator “Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan” dari target 79,74 terealisasi 79,74 dengan capaian kinerja 100%;
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dinilai dari hasil Penilaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo mendapatkan skor nilai 85,30 atau 108,99 % dari target nilai 78,26.

Kinerja Keuangan Kecamatan Panjatan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.815.552.333,84,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.786.095.893,- atau 98,38 %

Secara umum penyebab tidak tercapainya target kinerja keuangan maupun kinerja utama Kecamatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya efisiensi belanja rutin kegiatan sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi belanja.
2. Pengeluaran belanja sesuai dengan kondisi harga pasar dimana secara umum dibawah Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang menjadi dasar perencanaan anggaran.

Adapun solusi dari permasalahan diatas adalah :

1. Perlunya ketelitian dalam memperkirakan kebutuhan yang akan datang. Hal tersebut disiasati dengan melakukan konsultasi intensif terlebih dahulu dengan pihak - pihak terkait.
2. Perlunya perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan perkiraan harga pasar sehingga selisih anggaran dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi kegiatan yang lain.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Fungsi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan, menegaskan bahwa Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan.
- d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan; dan .
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan, telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kecamatan. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 403 Tahun 2012 tentang Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah mengatur Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan. Dari penjelasan tersebut fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.

## **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur Organisasi Kecamatan Panjatan. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Panjatan yang berada di bawah Camat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan :
  - Sub.Bagian Umum
  - Sub.Bagian Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
6. Seksi Pelayanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Struktur Organisasi Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 terlampir.

## **3. Isu Strategis**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panjatan ditentukan isu - isu penting yaitu sebagai berikut :

- a. Terjadinya potensi bencana alam diantaranya terjadi banjir, yang berdampak pada pemukiman dan persawahan;
- b. Infrastruktur fisik yang belum memadai diantaranya masih adanya kerusakan jalan dan saluran irigasi yang belum permanen;

- c. Pengelolaan lembaga keuangan desa yang masih belum optimal baik dalam pengelolaan administrasi maupun penanganan tunggakan;
- d. Permasalahan kekurangan air bersih dimusim kemarau di sebagian desa;
- e. Pengelolaan wilayah pesisir yang belum optimal dalam pengelolaan potensi wisata;
- f. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata;
- g. Adanya pembangunan mega proyek yaitu pembangunan bandara, pelabuhan adikarto, pengembangan pantai selatan;
- h. Semakin besarnya sumber pembiayaan pemerintah desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu peningkatan pendampingan dan pengawasan;
- i. Meningkatnya bantuan - bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, perlu kecermatan dalam pemerataan pembagian sesuai kriteria yang ditentukan diantaranya program Bedah Rumah, Baznas, PKH, BPJS, BPNT dan Bansos lainnya;
- j. Adanya Program Kinerja Pengembangan Smart City Perangkat Daerah, maka perlu meningkatkan SDM ASN, perangkat desa dan kelengkapan sarana prasarana yang mendukung.

Secara umum kondisi urusan yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kekurangan yang menimbulkan permasalahan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah masalah peningkatan pelayanan OPD. Pelayanan yang diberikan Kecamatan Panjatan sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu untuk terus ditingkatkan. Harapan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan harus disikapi oleh segenap aparat di Kecamatan Panjatan.

Beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di Kecamatan Panjatan antara lain :

- a. Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kulon Progo kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

- b. Dengan adanya pelimpahan sebagian urusan tersebut, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Kulon Progo;
- c. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh - sungguh memperhatikan *Coorporate Sosial Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar - benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Inovasi pelayanan, Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik, perlu dilaksanakan berbagai inovasi pelayanan secara cepat, efektif dan efisien, ramah, ikhlas dan akuntabel sehingga mencapai tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima bentuk - bentuk pelayanan.
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat dalam bentuk PATEN (Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan) sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
- f. Adanya mega proyek dan berbagai program kegiatan besar yang masuk di Kabupaten Kulon Progo, operasionalisasi Yogyakarta International Airport, Pelabuhan Adikarta, pengembangan pantai selatan, perlu dilakukan kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas baik masyarakat, aparatur pemerintah desa dan kecamatan.



- g. Peningkatan Pengetahuan Tehnologi Informasi bagi Aparat Kecamatan untuk mendukung kelancaran Program Kinerja Pengembangan Smart City dan meningkatkan sarana prasarana / fasilitas internet yang memadai.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Panjatan 2017 - 2022 ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2017 - 2022 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa ”**. Serta Misi ke-3 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”**.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah tersebut, maka ditetapkan tujuan Kecamatan Panjatan yaitu “Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif”. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panjatan yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan Renstra Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

#### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Panjatan menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk Tahun 2019 Kecamatan Panjatan merencanakan target kinerja Tahun 2019 yang telah sesuai dengan Renstra dan RKT. Adapun ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2019 seperti dijelaskan pada tabel berikut :

#### Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	79,74
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78,26

Sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan capaian pelaksanaan dihitung dari rumus ((Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan / Jumlah penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x 100) + (Jumlah dokumen RPTK dan Profil kecamatan yang disampaikan tepat waktu / Jumlah dokumen RPTK dan Profil kecamatan x 100) + (Jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib / Jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya ada x 100)) / 3. Sedangkan meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan dinilai dari hasil Penilaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

## A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Kecamatan Panjatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Panjatan Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Panjatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Panjatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut :

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	((Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan / Jumlah penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x 100) + (Jumlah dokumen RPTK dan Profil kecamatan yang disampaikan tepat waktu / Jumlah dokumen RPTK dan Profil kecamatan x 100) + (Jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib / Jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya ada x 100)) / 3	%	79,74	79,74	100
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei IKM	Indeks	78,26	85,30	108,99

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum pada Tahun 2019 sebesar 100 % dengan

klasifikasi sangat baik. Sedangkan meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan dinilai dari hasil Penilaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo mendapatkan skor nilai 85,30 atau 108,99 % dari target nilai 78,26.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja Tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya karena adanya perubahan formula perhitungan pada indikator kinerja meningkatnya cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022, sehingga terjadi perubahan target maupun realisasi.

Adapun formula perhitungan indikator kinerja meningkatnya cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berubah menjadi :

$$\left( \frac{\text{Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan}}{\text{Jumlah penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jumlah dokumen RPTK dan Profil kecamatan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen RPTK dan Profil kecamatan}} \times 100 \right) + \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib}}{\text{Jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya ada}} \times 100 \right) / 3$$

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra 2022	% Capaian s/d 2019 terhadap target akhir 2022
1.	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	((Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan / Jumlah penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x 100) + (Jumlah dokumen RPTK dan Profil kecamatan yang disampaikan tepat waktu / Jumlah dokumen RPTK dan Profil kecamatan x 100) + (Jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib / Jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya ada x 100)) / 3	%	79,74	94,12	84,72
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei IKM	Indeks	85,30	81,26	104,97

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional / kabupaten / kota

Realisasi Kinerja di Kecamatan Panjatan hanya dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2022, sedangkan untuk standar nasional tidak bisa dibandingkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja tahun 2019 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sampai dengan Tahun 2019 berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 79,74.

Capaian kinerja yang tergolong sangat baik tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

- a. Adanya dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan program kegiatan;
- b. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
- c. Adanya sistem informasi kinerja RencanaKu yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta sistem informasi kinerja MonevKu yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi diseluruh OPD;

- d. Motivasi Pimpinan OPD dalam menumbuhkan semangat kerja Tim Pelaksana Kegiatan dalam menyelesaikan kegiatan sesuai target yang direncanakan walaupun dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana kantor.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kecamatan;
- b. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;
- c. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung kelancaran pekerjaan;

Terhadap permasalahan tersebut, hal - hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

- a. Mengusulkan pemenuhan formasi JFU dan mengoptimalkan pegawai non PNS;
- b. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian;
- c. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Sedangkan kegiatan kemasyarakatan berupa fasilitasi kegiatan masyarakat yang dapat dilaksanakan Kecamatan Panjatan mengacu pada Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Capaian fasilitasi tersebut di laksanakan oleh lima seksi yang ada di Kecamatan Panjatan sesuai dengan target kinerja Triwulanan yang telah disusun.

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran, SDM, Sarana dan Prasarana)

### a. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2019

No	IKU	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran (.000)		%
						Target	Realisasi	
1	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	79,74	79,74	100	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	174.285.000	173.203.200	99,38
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,26	85,30	108,99	Peningkatan Pelayanan Kecamatan	53.620.000	53.303.300	99,41

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2019 tercapai 100% sementara keuangan 99,38% hal ini disebabkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran khususnya belanja ATK dan penggandaan karena dibelanjakan sesuai dengan harga pasar.

b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pada hasil Analisis Kebutuhan Pegawai (ANJAB) pada Kecamatan Panjatan kebutuhan pegawai sejumlah 30 orang, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Panjatan, jumlah riil pegawai yang ada sejumlah 20 orang (66,67 %).

Keadaan Formasi dan Bezetting Kecamatan Panjatan

No	Unit	Formasi	Bezetting	Keterangan
1.	Camat	1	1	0
2.	Sekretariat	10	8	-2
3.	Seksi Pemerintahan	2	2	0
4.	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	4	3	-1
5.	Seksi Kesejahteraan Rakyat	3	2	-2
6.	Seksi Pelayanan	5	2	-2
7.	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	2	-3
	Jumlah	30	20	-10

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Panjatan 2019

Namun demikian capaian kinerja kecamatan Panjatan dapat tercapai 100%, hal ini dicapai dengan melakukan optimalisasi penggunaan Sumber Daya Manusia yang ada.

c. Analisis Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan untuk mencapai capaian kinerja dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil Rekapitulasi Barang Inventarisasi Milik Daerah Tahun 2019 jumlah sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Panjatan sebagai berikut :

Rekapitulasi Barang Inventaris Milik Daerah Tahun 2019



No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah Barang
		B	RR	RB	
1	Portable Generating Set	2	-	-	2
2	Mobil	1	-	-	1
3	Sepeda Motor	8	-	2	10
4	Mesin Ketik	2	1	-	3
5	Filling Kabinet (besi)	10	-	-	10
6	Filling Kabinet (kayu)	1	-	-	1
7	Band Kas	1	1	-	2
8	Mutlimedia Proyektor	1	-	-	1
9	Almari (kayu)	13	-	-	19
10	Almari (besi)	2	-	-	2
11	Rak Arsip	5	-	-	5
12	Meja Kursi Tamu	1	-	-	1
13	Meja Rapat	27	-	-	27
14	Meja	7	-	3	10
15	Meja Pelayanan	1	-	-	1
16	Dingklik	4	-	-	4
17	Kursi Kerja	54	-	-	54
18	Kursi Tunggu	4	-	-	4
19	Kursi Lipat	97	-	-	97
20	Meja Komputer	4	-	-	4
21	Tenda	2	-	-	2
22	Meja Kerja	38	3	-	25
23	AC	2	-	-	3
24	Kipas Angin	7	3	-	10
25	Camera Digital	2	-	-	2
26	Mimbar/ podium	2	-	-	2
27	Komputer	6	-	-	5
28	Lap Top	4	-	-	4
19	Scanner	1	-	-	2
30	Printer	5	-	-	6
31	Megaphone	1	-	-	1
32	Wireless Amplifier	2	2		4
33	Bangunan Gedung(Gedung kantor induk)	1	-		1
34	Bangunan Gedung(Gedung kantor barat)	1	-		1
35	Bangunan Gedung(Gedung pendopo)	1	-		1
36	Bangunan Gedung(Rumah Dinas)	1	-		1
37	Bangunan Gedung(EKSBRI) 105 M2	1	-		1
38	Bangunan Gedung (Paten)	1	-		1
39	Bangunan Gedung(Gasebo tempat merokok)	1	-		1
40	Bangunan lainnya(Pagar)	1	-		1
41	Bangunan lainnya(Pagar)	1	-		1

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah Barang
		B	RR	RB	
42	Buku Perpustakaan	86	-		-
43	Mesin Facsimile	1	-		1
44	Papan Data	1	-		1
45	Televisi	1	1		2
46	Amplifier	1	2		3
47	Soud Speaker	3	-		3
48	Microphon	1	2		3
49	Dispencer	1	-		1
50	Meja Pingpong	1	-		1
51	Tape Recorder	1	-		1
52	Mesin Pemotong Rumput	1	-		1
53	Lemari Kaca	4	-		4
54	Pesawat Telepon	1	-		1
55	Stabiliser	1	-		1
56	Sepeda Motor Yamaha Jupiter 2CW Vin2019	1	-		1
57	AC. 1,5 PK (Merk Meidea)	1	-		1

Sumber : Laporan Aset Tahun 2019

7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan capaian kelima program yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2019, menunjukkan angka capaian sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Peningkatan Pelayanan Kecamatan	53.620.000,00	53.303.300,00	99,41
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	174.285.000,00	173.203.200,00	99,38
3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.437.000,00	129.221.400,00	99,07
4.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	198.804.050,00	186.797.035,00	93,96
5.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	23.922.300,00	23.307.400,00	97,43
JUMLAH		581.068.350,00	565.832.335,00	

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut karena semangat, kerja keras dan kerjasama Tim Kegiatan serta motivasi pimpinan dalam melaksanakan tugas.

## B. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dari rincian anggaran program / kegiatan tahun 2019 tersebut di atas dapat dilaporkan bahwa dari alokasi dana OPD Kecamatan Panjatan sebesar Rp. 1.815.552.333,84,- terealisasi sebesar Rp. 1.786.095.893,- atau 98,38 % dengan rincian :

### 1. Belanja tidak langsung

Dana alokasi Rp. 1.234.483.983,84,- terealisasi Rp. 1.220.263.558,00,- atau 98,85 %

### 2. Belanja langsung

Dana alokasi Rp. 581.068.350,00,- terealisasi Rp. 565.832.335,00,- atau 97,38 %

Dapat di simpulkan bahwa program / kegiatan Kecamatan Panjatan dapat berjalan dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Capaian keuangan untuk belanja langsung mencapai 97,38 %, dan saldo anggaran yang disetor kembali berasal dari efisiensi akibat pembelanjaan semua kegiatan yang disesuaikan dengan harga pasar ( tidak sesuai dengan harga tertinggi standarisasi barang dan jasa yang tertuang dalam DPA ).

Kinerja					Program Keuangan			
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	79,74	79,74	100	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	174.285.000	173.203.200	99,38
Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,26	85,30	108,99	Peningkatan Pelayanan Kecamatan	53.620.000	53.303.300	99,41

## BAB IV

## PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Panjatan yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2017 - 2022 adalah mengacu pada Visi Kabupaten Kulon Progo yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Panjatan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Panjatan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Panjatan Tahun 2017 - 2022.

Dari analisis terhadap dua (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan indikator “Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan” dari target 79,74 terealisasi 79,74 dengan capaian kinerja 100%;
2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 78,26 tercapai dengan nilai 85,30 dengan capaian 108,99%.

Kinerja Keuangan Kecamatan Panjatan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.815.552.333,84,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.786.095.893,- atau 98,38 %

Secara umum penyebab tidak tercapainya target kinerja keuangan maupun kinerja utama Kecamatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya efisiensi belanja rutin kegiatan sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi belanja.
2. Pengeluaran belanja sesuai dengan kondisi harga pasar dimana secara umum dibawah Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang menjadi dasar perencanaan anggaran.

Adapun solusi dari permasalahan diatas adalah :

1. Perlunya ketelitian dalam memperkirakan kebutuhan yang akan datang. Hal tersebut disiasati dengan melakukan konsultasi intensif terlebih dahulu dengan pihak - pihak terkait.
2. Perlunya perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan perkiraan harga pasar sehingga selisih anggaran dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi kegiatan yang lain.

Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait, penyempurnaan dokumen, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa - masa yang akan datang.

Panjatan, 23 Januari 2020

PANEWU PANJATAN

SETIAWAN TRI WIDADA, S.Sos  
Pembina Tk. I, IV.b  
NIP. 19710603 199101 1 004

